



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPARDI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 856977

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.753.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 294 m2/210 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 661.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/100 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, LAINNYA Rp. 385.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/107 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 258.000.000
4. Tanah Seluas 299 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, LAINNYA Rp. 448.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **335.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI BJ 175 A Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **70.250.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **27.778.709**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 2.186.028.709

III. HUTANG

Rp. 5.800.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.180.228.709

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.